

**Kajian Kondisi Dan Model Kelembagaan Penyelenggaraan Penyuluhan
Pertanian di Kabupaten Magelang**

***Study of Conditions and Institutional Models for Implementing Agricultural
Extension in Magelan Regency***

¹Lutfan Makmun, ²Budi Setiyo

¹Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang
Jl. Magelang Kopeng Km 7, Tegalrejo, Magelang

²Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang
email: maslutvan@gmail.com

ABSTRAK

Fungsi utama penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah menyebarkan teknologi dan adopsi teknologi pertanian kepada petani atau petani melalui penguasaan teknologi pertanian yang baik sehingga produktivitas meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga. Kondisi kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan pertanian di suatu daerah. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Kelembagaan penyuluhan pertanian adalah lembaga pemerintah dan/ atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan pertanian dari pusat hingga desa.

Tujuan Penelitian ini antara lain: 1). Untuk mendeskripsikan kondisi kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang; 2). Untuk mengetahui optimalisasi kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang; Untuk menggambarkan konseptualisasi model kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang.

Penelitian di desain menggunakan penelitian survey dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yakni mendeskripsikan variabel penelitian yang telah ditetapkan dengan alokasi waktu 3 bulan dimulai bulan September – November 2018. Jenis data yang digunakan adalah data subyek (*self report data*), pengambilan sampel responden penelitian dilakukan secara *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 responden yang merupakan karyawan/individu pelaksana teknis dan fungsional terkait penyelenggaraan bidang penyuluhan pertanian pada dinas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan, kelompok tani/ wanita tani. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Uji reabilitas dilakukan melalui konsistensi antar pertanyaan menggunakan pengukuran sekali saja (*one shoot*) dengan cara mengukur korelasinya menggunakan uji statistik *Cronbach Alfa* (α).

Indikator parameter yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 5 aspek penyelenggaraan penyuluhan pertanian antara lain: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Ketenagaan; 3). Manajemen pelaksanaan; 4). Pembiayaan; 5). Sarana Prasarana.

Hasil penelitian ini antara lain: 1). Kondisi kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dimana Kelembagaan penyuluhan pertanian sudah terbentuk hingga desa; 2). Kondisi kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang cukup baik meskipun dalam beberapa hal belum optimal terutama pada aspek pembiayaan, anggaran yang tersedia masih sangat kecil dibanding kebutuhan yang diperlukan; 3). Konseptualisasi model pemberdayaan Petani di Kabupaten Magelang sudah merepresentasikan kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Kata Kunci: Kelembagaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

ABSTRACT

The main function of implementing agricultural extension is to disseminate technology and the adoption of agricultural technology to farmers or farmers through mastery of good agricultural technology so that productivity increases and ultimately increases household economic income. The institutional conditions for implementing agricultural extension services are an important factor in the success of agricultural development in an area. Agricultural, Fisheries and Forestry Extension Institutions. Agricultural extension institutions are government and / or community institutions that have the task and function of organizing agricultural extension from the center to the village.

The objectives of this study include: 1). To describe the institutional conditions for implementing agricultural extension services in Magelang Regency; 2). To determine the institutional optimization for the implementation of agricultural extension in Magelang Regency; To illustrate the conceptualization of the institutional model for implementing agricultural extension services in Magelang Regency.

The research was designed using survey research with a quantitative descriptive approach, which describes the research variables that have been determined with a time allocation of 3 months starting September - November 2018. The type of data used is subject data (self report data), sampling of research respondents was carried out by purposive sampling . The sample in this study were 30 respondents who were employees / individual technical and functional implementers related to the implementation of agricultural extension at the Department of Agriculture and Food in Magelang Regency, Field Agricultural Extension (PPL) at the District Agricultural Extension Center, farmer groups / female farmers. . The data collection techniques used were interviews and questionnaires. The reliability test was carried out through consistency between questions using a one-time measurement (one shoot) by measuring the correlation using the Cronbach Alfa (α) statistical test.

The parameter indicators used in this study cover 5 aspects of the implementation of agricultural extension, including: 1). Institutional Aspects; 2). Manpower Aspects; 3). Implementation management; 4). Financing; 5). Infrastructure.

The results of this study include: 1). The institutional conditions for administering agricultural extension in Magelang Regency are in accordance with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 154 of 2014 concerning Agricultural, Fisheries, and Forestry Extension Institutions, where the agricultural extension

institutions have been established to villages; 2). The institutional condition for the implementation of agricultural extension in Magelang Regency is quite good, although in some ways it is not optimal, especially in the aspect of financing, the available budget is still very small compared to the needs needed; 3). The conceptualization of the farmer empowerment model in Magelang Regency has represented the institutional implementation of agricultural extension in accordance with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 154 of 2014 concerning Agricultural, Fisheries and Forestry Extension Institutions.

Keywords: *Institutionalization of Agricultural Extension Administration*

PENDAHULUAN

Peran penyuluhan pertanian adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian agar menjadi daya gerak pembangunan pertanian dalam era otonomi daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Hakekat penyuluhan adalah memberikan pencerahan bagi masa depan masyarakat tani, bukan semata-mata penyebarluasan ilmu pengetahuan dan diseminasi inovasi teknologi (Sudarman, 2008).

Fungsi utama penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah menyebarkan teknologi dan adopsi teknologi pertanian kepada petani atau petani melalui penguasaan teknologi pertanian yang baik sehingga produktivitas meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian terdiri dari beberapa aspek anatara lain : 1). Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; 2). Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; 3) Manajemen Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; 4). Pembiayaan Penyuluhan Pertanian; 5). Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian.

Salah satu faktor keberhasilan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian bermula dari penyelenggaraan penyuluhan pertanian dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian program dan evaluasi penyuluhan pada setiap tingkatan. Keterpaduan mengandung maksud bahwa program dan evaluasi penyuluhan pertanian disusun dengan memperhatikan program dan evaluasi penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan nasional dengan berdasarkan kebutuhan petani sebagai pelaku utama agribisnis.

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Kelembagaan penyuluhan pertanian adalah lembaga pemerintah dan/ atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan pertanian.

Masalah utama yang mengemuka dari penjelasan diatas adalah model pemberdayaan petani oleh *stake holder* saat ini belum dapat menghasilkan produk berkualitas dan meningkatkan pendapatan secara signifikan, sehingga diperlukan penelitian yang mengkaji lebih dalam bagaimana model pemberdayaan petani agar dapat meningkatkan pendapatannya, yang dapat diuraikan dalam rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang apakah sudah sesuai dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dimana Kelembagaan penyuluhan pertanian sudah terbentuk hingga desa ?.

2. Sejauhmana kondisi kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang ?.
3. Bagaimana konseptualisasi model kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang ?.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang apakah sudah sesuai dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dimana Kelembagaan penyuluhan pertanian sudah terbentuk hingga desa.
- b. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan kondisi kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang.
- c. Untuk menggambarkan konseptualisasi model kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang ?.

Kerangka Teori Penelitian

Perubahan paradigma dalam pemberdayaan petani saat ini memegang peranan penting dengan menekankan pada alih teknologi ke paradigma baru yang mengutamakan pada sumberdaya manusianya, yang dikenal dengan pendekatan *farmer first*, atau “mengubah petani” dan bukan “mengubah cara bertani”, sehingga memungkinkan terjadi pemberdayaan pada diri petani. Upaya mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan tersebut, tampak betapa pentingnya keterpaduan atau sinergisme antara kegiatan pembangunan biofisik di lapangan, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial (*community development* atau *empowerment*).

Produk berkualitas berorientasi pasar merupakan sesuatu yang penting bagi sebuah usaha sejalan dengan meningkatnya persaingan global dan perubahan dalam kebutuhan pelanggan dimana perusahaan menyadari bahwa mereka harus selalu dekat dan mengikuti selera pasar. Orientasi pasar merupakan budaya bisnis modern maupun organisasi sebagai komitmen untuk terus berkreasi dalam menciptakan nilai unggul dan kepuasan bagi pelanggan. Produk berkualitas, bernilai jual yang berorientasi pasar memiliki 3 elemen utama yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing dan koordinasi interfunksional.

Pemberdayaan petani saat ini dilakukan melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Kerangka teori penelitian merupakan landasan untuk menyusun model temuan sebagai penyempurnakan model pemberdayaan petani yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian saat ini. Pemberdayaan petani diharapkan dapat mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan petani untuk dapat memiliki produk berkualitas yang bernilai jual tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya.

2. Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian disusun untuk menjelaskan variabel-variabel mana yang berkedudukan sebagai variabel eksogen, variabel intervening, dan variabel endogen. Dengan preposisi yang didasarkan pada studi teoritik dan empirik akan diketahui berapa banyak hipotesis yang harus disusun, variabel yang terkandung

dalam masing-masing hipotesis dan bagaimana hubungan pengaruh antar variabelnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Variabel Konstruk/ Laten Endogen

Konstruk/ Laten Endogen	Reabilitas Latent Eksogen	Kode Indikator
Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Y)	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	X1
	Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	X2
	Manajemen Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	X3
	Pembiayaan Penyuluhan Pertanian	X4
	Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian	X5

Sumber: Data terolah (2018)

Kerangka konseptual hingga terbentuknya model pemberdayaan disusun untuk menjelaskan variabel-variabel mana yang berkedudukan sebagai variabel eksogen, variabel intervening, dan variabel endogen. Dengan preposisi yang didasarkan pada studi teoritik dan empirik akan diketahui berapa banyak hipotesis yang harus disusun, variabel yang terkandung dalam masing-masing hipotesis dan bagaimana hubungan pengaruh antar variabelnya.

3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain :

- a. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang apakah sudah sesuai dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dimana Kelembagaan penyuluhan pertanian sudah terbentuk hingga desa.
- b. kondisi kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang sudah cukup baik.

MATERI DAN METODE

1. Desain Penelitian

Desain penelitian digunakan untuk mengetahui dan mendiskripsikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang apakah sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dimana Kelembagaan penyuluhan pertanian sudah terbentuk hingga desa.

Penelitian di desain menggunakan penelitian survey dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yakni mendeskripsikan variabel penelitian yang telah ditetapkan dengan alokasi waktu 3 bulan dimulai bulan September – November 2018. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1989).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek (*self report data*), yaitu jenis data penelitian yang berupa sikap, opini, pengalaman pejabat struktural eselon III, IV dan kelompok fungsional penyuluh di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tegalrejo, Sawangan, Kajoran, petani, pengurus kelompok tani terpilih.

- Data primer

Data primer ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dalam hal ini adalah petani petani yang tergabung dalam kelompok tani PE dengan persyaratan : mempunyai usaha tani minimal 10 tahun dengan luasan lahan 1000 – 3000 m, tergabung dalam kelompok tani/ wanita tani.

- Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan petani, kelompok tani terpilih berupa data-data tentang penyuluhan pertanian dan pemberdayaan sesuai yang menjadi obyek penelitian ini.

3. Populasi Sasaran

Penelitian dilakukan di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Data jumlah luasan lahan, jumlah produksi, pelaku usaha, program pemberdayaan yang telah dilakukan, diperoleh dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan.

4. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2007). Variable penelitian tahap I antara lain: 1). Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; 2). Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; 3) Manajemen Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; 4). Pembiayaan Penyuluhan Pertanian; 5). Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian.

5. Teknik Penentuan Sampel

Pengambilan sampel sebagai responden penelitian dilakukan secara *purposive sampling*. Karakteristik responden adalah responden yang merupakan karyawan/individu – individu tingkat pelaksana teknis dan fungsional yang terkait dengan peyelenggaraan bidang penyuluhan pertanian pada dinas terkait yakni Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dan pengisian responden dilakukan dengan petani ternak yang memenuhi kriteria responden, pimpinan, staf dan karyawan terkait penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

7. Uji Instrument

Seperti telah diuraikan dalam teknik pengambilan data, kuisisioner sebagai instrumen yang berkaitan dengan pengukuran pemberdayaan petani perlu diuji syarat reabilitas dan validitasnya. Uji instrument dilakukan kepada 30 orang anggota kelompok tani dan responden di wilayah penelitian.

8. Uji reabilitas kuisisioner

Variable penelitian dirumuskan sebagai sebuah variable konstruk (*un-observed*), yaitu suatu variable yang dapat diukur secara langsung tetapi dibentuk melalui indikator – indikator yang diamati dengan menggunakan kuisisioner atau angket. Uji reabilitas dilakukan melalui konsistensi antar pertanyaan menggunakan pengukuran sekali saja (*one shoot*) dengan cara mengukur korelasinya menggunakan uji statistik *Cronbach Alfa* (α). Suatu konstruk atau variable dikatakan reabel jika memberikan nilai $\alpha > 0,60$ (Nunnally 1967 dalam Ghozali, 2006).

9. Uji Validitas Kuisisioner

Uji validitas dapat diukur dengan menggunakan korelasi bivariate antara masing – masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila setiap skor indikator terhadap skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan maka pertanyaan dikatakan valid (Ghozali, 2006).

10. Metode Penelitian Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah diskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan data primer dan kondisi jawaban responden untuk masing-masing variabel. Hasil jawaban tersebut selanjutnya digunakan untuk mendapatkan tendensi jawaban responden mengenai kondisi masing-masing variabel penelitian. Diskripsi ini untuk mengetahui sejauhmana penyelenggaraan penyuluhan, optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan dan model pemberdayaan penyuluhan dengan materi adopsi paket teknologi pertanian dilaksanakan saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini untuk mendiskripsikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan model pemberdayaan dan bagi petani yang dilaksanakan saat ini. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian meliputi beberapa aspek antara lain : 1). Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; 2). Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; 3) Manajemen Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; 4). Pembiayaan Penyuluhan Pertanian; 5). Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian.

1. Aspek Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Kelembagaan penyuluhan pertanian adalah lembaga pemerintah dan/ atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan pertanian.

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Magelang terdiri dari Kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya. Adapun hasil penelitian

aspek penyelenggaraan penyuluhan pertanian pemerintah dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Penelitian Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Pemerintah

Variabel Diamati	Hasil Penelitian
Kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah terbentuk dan memberikan pembinaan
Tingkat provinsi berbentuk Bidang Penyuluhan Pertanian di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah	Bidang Penyuluhan Pertanian di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah telah terbentuk dan memberikan pembinaan
Pada tingkat Kabupaten berbentuk Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh dan Bidang Penyuluhan di Dinas Pertanian dan Pangan	Tupoksi Jabatan Fungsional Penyuluh dan Bidang Penyuluhan
Pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan memberikan pemberdayaan kelompok tani/ petani/ GAPOKTAN melalui penyuluhan pertanian
Pada Tingkat Desa berbentuk Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP)	Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) pemberdayaan kelompok tani/ petani/ GAPOKTAN melalui penyuluhan pertanian oleh PPL
Pada tingkat petani Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	Kelompok Tani dan GAPOKTAN dibentuk melalui pengukuhan BPPK

Sumber: Data terolah (2018)

Kelembagaan penyuluhan swasta di Kabupaten Magelang dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Telah terdaftar 52 penyuluh swasta di Kabupaten Magelang. Kelembagaan penyuluhan swadaya dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha. Kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/ kelurahan yang bersifat nonstruktural. Hingga tahun 2019 telah ada 154 penyuluh swadaya di Kabupaten Magelang yang tersebar di 21 kecamatan.

2. Aspek Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Ketenagaan penyuluhan pertanian meliputi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh pertanian di tingkat lapangan, penempatan satu penyuluh satu desa, pelatihan, permagangan, pendampingan diarahkan memperkuat pemberdayaan masyarakat tani, pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi penyuluh dan Sistem Informasi Ketenagaan Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN). Adapun hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Penelitian Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Variabel Diamati	Hasil Penelitian
Pengembangan Penyuluh Pertanian polivalen di tingkat lapangan dan Penyuluh Pertanian Spesialis di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa	<ul style="list-style-type: none">- Penyuluh Pertanian spesialis belum ada di tingkat kabupaten, kecamatan, desa terutama spesialis penyuluh pengolah hasil ternak.- Penyuluh polivalen di BPPK telah ada ditunjukkan dengan adanya penyuluh penyuluh pertanian yang merangkap penyuluh petanian atau perikanan
Penempatan satu penyuluh satu desa mendukung satu desa satu komoditas unggulan dengan mengoptimalkan peran penyuluh PNS, penyuluh Swadaya, dan penyuluh Swasta	<ul style="list-style-type: none">- Penempatan satu penyuluh PNS, THL, penyuluh Swadaya, dan penyuluh Swasta satu desa telah dilakukan namun belum mendukung satu desa satu komoditas unggulan
Pelatihan, permagangan dan pendampingan diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat tani, antara lain melalui program PUAP, LM3, SMD, dan 4PMD, guna mempercepat pertumbuhan agribisnis di perdesaan	<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan, permagangan dan pendampingan diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat tani, antara lain melalui program PUAP, LM3, SMD, dan 4PMD, guna mempercepat pertumbuhan agribisnis di perdesaan sering dilakukan tercatat 15 kali dalam satu tahun.- Pelatihan, permagangan dan pendampingan diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan petani khususnya materi pengolahan hasil ternak hanya 3 kali dalam satu tahun- Pelatihan, permagangan dan pendampingan diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan petani
Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan diarahkan untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis	<ul style="list-style-type: none">- Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan diarahkan untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis telah dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun- Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan diarahkan untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis

Variabel Diamati	Hasil Penelitian
Pelatihan bagi aparatur diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi	- Pelatihan bagi aparatur diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi - dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten
Pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional	- Pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional dilakukan melalui diklat aparatur dasar ahli dan sertifikasi penyuluh namun dalam jumlah sedikit (5 orang per tahun)
Pemantapan sistem administrasi dan manajemen penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.	- Pemantapan sistem administrasi dan manajemen penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih telah dilakukan sejak tahun 2007 melalui Sistem Informasi Penyuluhan (SIMLUH) yang dikelola oleh pemerintah Pusat

Sumber: Data terolah (2018)

3. Aspek Manajemen Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Manajemen pelaksanaan penyuluhan pertanian di Indonesia disusun dalam program penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan di setiap tingkatan. Program penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan. Hasil penelitian dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Hasil Penelitian Aspek Manajemen Pelaksanaan Penyuluhan

Variabel Diamati	Hasil Penelitian
Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan	Programa penyuluhan telah disusun dari tingkat kabupaten hingga desa

Variabel Diamati	Hasil Penelitian
Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/ kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional	Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/ kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional telah disusun namun belum dipublikasikan keseluruhan
Programa penyuluhan disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan	Programa penyuluhan disusun sudah memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan meskipun belum optimal hal ini ditandai dengan belum terfasilitasinya beberapa rencana kerja dan materi penyuluhan yang dibutuhkan oleh petrnak
Programa penyuluhan disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota, Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi, atau Kepala Badan Penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan. Programa penyuluhan desa/kelurahan diketahui oleh kepala desa/ kelurahan	Pengesahan programa penyuluhan telah dilakukan walaupun masih ada yang tidak tepat waktu
Programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan	Programa penyuluhan telah disusun setiap dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan namun program penyuluhan pengolahan hasil ternak masih sangat kecil
Programa penyuluhan harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung gugat	Masih ada programa penyuluhan yang belum terukur dengan jelas, realistis, manfaat kecil, belum dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung gugat. Hal ini disebabkan sudut pandang teknokratis dalam perencanaan belum sepenuhnya dikuasai oleh penyusun

Sumber: Data terolah (2018)

4. Aspek Pembiayaan Penyuluhan Pertanian

Untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai untuk memenuhi biaya penyuluhan, sehingga

pembiayaan penyuluhan pertanian merukan salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyuluhan pertanian. Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/ kota, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Hasil penelitian aspek pembiayaan dapat dilihat dalam tabel 5. berikut ini.

Tabel 5. Hasil Penelitian Aspek Pembiayaan Penyuluhan Pertanian

Variabel Diamati	Hasil Penelitian
Untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai untuk memenuhi biaya penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan penyuluhan telah tersedia pembiayaan penyuluhan namun jumlahnya belum memadai alokasi pada sektor pertanian menurut data MUSRENBANG Kabupaten Magelang 2019 sebesar 1,8 % dari APBD - Alokasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebesar 1,2 %, jumlah ini merupakan jumlah yang masih jauh dari mencukupi untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang mencapai 4 %
Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat	<p>Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pertanian - APBD provinsi - APBD kabupaten - Lintas sektoral - Kerjasama
Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan	Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS serta sarana dan prasarana bersumber dari APBD Kabupaten Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh Non PNS (THL) serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN
Jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS didasarkan pada jenjang jabatan sesuai dengan peraturan perundangundangan	Jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS didasarkan pada jenjang jabatan sudah ada namun masih kecil

Variabel Diamati	Hasil Penelitian
Dalam hal penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, pembiayaannya dapat dibantu oleh Pemerintah dan pemerintah daerah	Penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, pembiayaannya dibantu oleh Pemerintah Daerah Kanupeten dan Provinsi namun jumlahnya masih kecil

Sumber: Data terolah (2018)

5. Aspek Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian

Sarana prasarana penyuluhan pertanian adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat utama dan alat penunjang dalam proses penyelenggaraan penyuluhan, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/12/2009 Tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian, bahwa sarana prasarana penyuluhan pertanian adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Tujuan disusunnya pedoman standar minimal dan pemanfaatan sarana prasarana penyuluhan pertanian dalam peraturan menteri tersebut adalah untuk:

1. Memenuhi kebutuhan minimal sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.

Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) merupakan kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat kecamatan. Standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan kecamatan meliputi : pusat Informasi, peralatan administrasi, alat transportasi kendaraan operasional roda dua, Buku dan Hasil Publikasi, Mebeulair, ruangan, rumah dinas, sarana/prasarana pendukung/lingkungan, sumber air bersih, penerangan, jalan lingkungan, pagar halaman, lahan percontohan. Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan telah tersedia meskipun masih ada beberapa yang belum lengkap, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6. Hasil Penelitian Aspek Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian

Variabel Diamati	Hasil Penelitian
Pusat informasi : (1) Perlengkapan komputer + Modem + LAN (local areal network); (2) Display; (3) Kamera digital; (4) Handycam; (5) Telepon + Mesin fax	Telah tersedia sebagian besar namun belum lengkap (belum memiliki : Handycam, Mesin Fax)
Alat bantu penyuluhan : (1) Overhead projector; (2) LCD projector; (3) Sound system (wireless, megaphone, mic); (d) TV,VCD/DVD,tape recorder; (4) Whiteboard/panelboard	Telah tersedia dan dalam kondisi baik
Peralatan administrasi : (1) Komputer + printer + power supply; (2) Mesin tik; (3) Kalkulator; (4) Brankas; (4) Rak buku	Telah tersedia sebagian besar namun belum lengkap (belum memiliki : Brankas)
Alat Transportasi kendaraan operasional roda dua	Telah tersedia namun belum semua PPL memperoleh sepeda motor, Jumlah Penyuluh sebanyak 12 ketersediaan sepeda motor 3 unit
Buku dan hasil publikasi	Telah tersedia namun belum lengkap terutama hasil publikasi teknologi terapan terbaru
Mebeulair : (1) Meja + kursi kerja; (2) Meja + kursi rapat; (3) Meja + kursi pelatihan; (4) Meja + kursi perpustakaan; (5) Meja + kursi makan; (6) Rak buku perpustakaan; (7) Lemari buku + Arsip; (8) Peralatan makan/minum; (9) Peralatan dapur	Telah tersedia lengkap dan kondisi baik
Kebutuhan ruangan : (1) Pimpinan; (2) Administrasi/ TU; (3) Kelompok jabatan fungsional; (4) Aula/Rapat; (5) Perpustakaan; (6) Data dan System informasi; (7) Pameran, peraga dan promosi; (8) Kamar mandi; (9) Dapur; (10) Gudang	Telah tersedia lengkap dan kondisi baik
Rumah dinas	Belum tersedia
Sarana/prasarana pendukung/lingkungan	Telah tersedia dan kondisi baik
Sumber air bersih	Telah tersedia dan kondisi baik
Penerangan (PLN/genset)	Telah tersedia lengkap dan kondisi baik
Jalan lingkungan	Telah tersedia dan kondisi baik
Pagar halaman	Belum tersedia
Lahan percontohan	Telah tersedia

Sumber: Data terolah (2018)

Analisis Tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan adalah hasil perbandingan antara nilai kesesuaian dengan standar dan jumlah komponen. maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

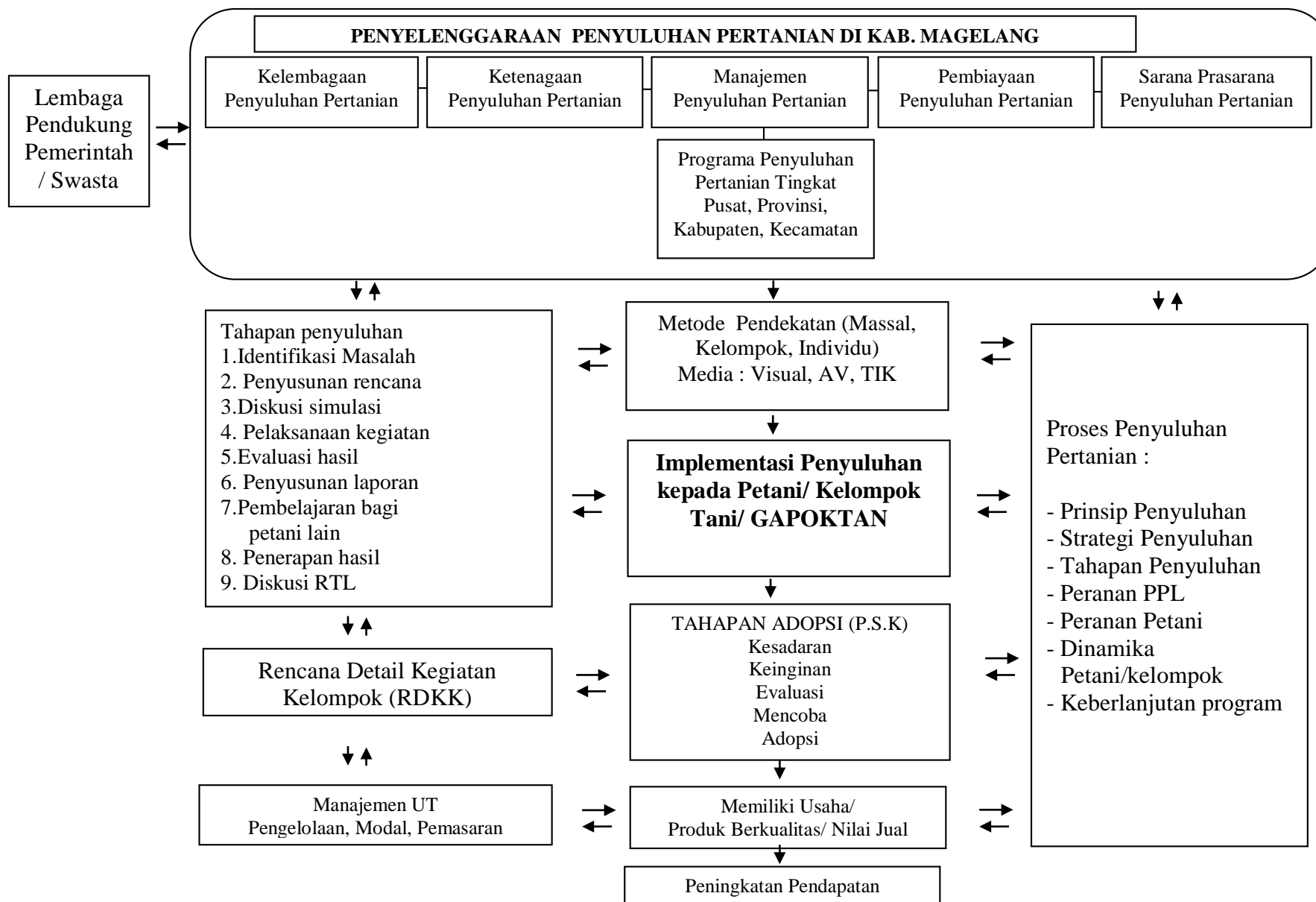
$$\text{TPSP (\%)} = \text{Xi/Yi} \times 100\%$$

Dimana : TPSP : Tingkat ketersediaan sarana prasarana; Xi : Jumlah komponen sarana prasarana yang sesuai standar minimal; Yi : Jumlah komponen standar minimal

Berdasarkan skor tertinggi adalah 1 maka untuk pertanyaan 1-52 nilai tertinggi yang akan diperoleh mengenai ketersediaan sarana prasarana sebesar 52. Berdasarkan jumlah nilai dibuat klasifikasi ketersediaan sarana prasarana dalam tiga kategori : Baik : > 65% dari 52 sub komponen atau nilai skor > 34; Sedang : 33-65% dari 52 sub komponen atau nilai skor 17-34 ; Buruk : < 33% dari 52 sub komponen atau nilai skor < 17.

Lembar observasi bagian kedua digunakan untuk mengidentifikasi kondisi sapras yang tersedia. Pengukuran dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dan pengamatan langsung pada kondisi (kualitas) sapras dengan memberikan tanda ceklis (√) pada kondisi sapras. Hasil ukur yang digunakan adalah : Baik : Skor 3; Rusak Ringan : Skor 2 (kondisi kerusakan ≤ 15%); Rusak Menengah : Skor 1(kondisi kerusakan 15 s.d. 50%); Rusak Berat : Skor 0 (kondisi kerusakan ≥ 50%); Berdasarkan jumlah nilai dibuat klasifikasi kondisi sarana prasarana dalam tiga kategori: Baik : > 65% dari 52 sub komponen atau nilai skor > 34; Sedang : 33-65% dari 52 sub komponen atau nilai skor 17-34 ; Buruk : < 33% dari 52 sub komponen atau nilai skor < 17. Berdasarkan jumlah nilai klasifikasi ketersediaan sarana prasana BPPPK Kecamatan Borobudur memperoleh nilai sebesar 45 sehingga masuk dalam kategori baik.

Berdasarkan rangkaian penyelenggaraan penyuluhan diatas, peneliti merangkum menjadi sebuah model pemberdayaan petani yang dilaksanakan saat ini. Model pemberdayaan adalah pola atau skema menyeluruh yang terdiri dari rangkaian abstraksi kegiatan pemberdayaan yang dapat memberikan gambaran dari sistem sebenarnya. Pengembangan dan evaluasi model pemberdayaan yang telah ada dan berbeda dari waktu ke waktu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan petani meskipun model tersebut tidak sepenuhnya membawa adopsi dan keberlanjutan teknologi (Awolowo, 2010). Adapun model pemberdayaan yang dilaksanakan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Konseptualisasi Model Pemberdayaan Petani di Kabupaten Magelang

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Kondisi kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dimana Kelembagaan penyuluhan pertanian sudah terbentuk hingga desa.
- b. Kondisi kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang cukup baik meskipun dalam beberapa hal belum optimal terutama pada aspek pembiayaan, anggaran yang tersedia masih sangat kecil dibanding kebutuhan yang diperlukan.
- c. Konseptualisasi model pemberdayaan Petani di Kabupaten Magelang sudah merepresentasikan kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

2. Saran

- a. Melakukan optimalisasi pendayagunaan faktor internal dalam aspek ketenagaan penyuluhan pertanian, manajemen pelaksanaan penyuluhan pertanian, Pembiayaan Penyuluhan Pertanian.
- b. Melakukan upaya optimasilasi berdasarkan konseptualisasi model pemberdayaan Petani di Kabupaten Magelang sesuai kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. 2001, Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia, Erlangga, Jakarta.
- Bradshaw T.K. 2007. *Theories of Poverty and Anti-Poverty Programs in Community Development, Community Development*; Spring; 38, 1; ProQuest Agriculture Journals, pg. 7.
- Dzeco, C. Amilai and A. Cristóvão, 2010. *Farm Field Schools And Farmer's Empowerment In Mozambique: A Pilot Study, Innovation And Change Facilitation For Rural Development* .C onceptual Issues9th European Ifsa Symposium, 4-7 July 2010, Vienna (Austria).
- Departemen Pertanian. 2008. Pedoman Umum Pelaksanaan Penyuluhan. Pusbangluhtan, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Harry, H. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Kartasapoetra, A. G. 1991. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mawardi, S. 2004. Persoalan Penyuluhan di Era Otonomi Daerah, SMERU Newsletter, Desember 2004, Jakarta.
- Mardikanto, 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Sebelas Maret University Presss, Surakarta.
- Margono Slamet. 1978. Kumpulan Bahan Bacaan Penyuluhan Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Muhajir, Noeng. 1987. Kepemimpinan Adopsi Inovasi Untuk Pembangunan Masyarakat, Penerbit Rake Press, Yogyakarta.

- Mundy, Paul. 2000. *Adopsi dan Adaptasi Teknologi Baru*. PAATP3. Bogor
- OECD, 1993. *Small and Medium-sized Enterprises: Technology and Competitiveness*. Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris.
- Rivera, W.M., and Gustafson, D.J. 1991. *Agricultural Extension: Worldwide Institutional Evolution and Forces for Change*. Elsevier Science Publishing, Amesterdam.
- Roling, N. 1990. *The Agricultural Research-Technology Transfer Interface: A Knowledge System Perspective*. Boulder, CO: Westview Press.
- Rogers, E, dan F.F. Soemaker.1971. *Comunication of Innovation Across Cultural Approach*. Second Edition, New York, Mcmilland Ltd.
- Rogers, Everett. 2003. *Diffusion of Innovation*. New York: Free Press